

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Heliarta. (2020). Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit.
- Zakaria, Junaiddin. (2021). Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan.
- Bappenas. (2019). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sukirno, S.A. (2009). Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2015). Economic Development. Boston: Pearson Education Limited.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005
- Syafrudin, Ateng. Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press Tahun 1984.
- Gadang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Yogyakarta:Laksbang Presindo, 2005.
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Jimly Asshidiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta:UI Press, 1996.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara

Undang-Undang No. 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara.

C. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2023 Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (PP No 27/2023)

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

D. Jurnal

Ahliyan, Y. (2022). Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2.

Ahmad Gelora Mahardika, R. S. (2022). Problematika Juridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol 2 No 1.

Cahya, K. (2019). Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 Issue 3.

Herdina, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Transformativ*, Vol. 8, No. 1, 3.

Indriyany, I. A. (2019, Juni). Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan? *Journal of Social Politics and Governance*, Vol.1 No.1, 2-3.

Ismiyanto, & Firstnandiar G.A., S. (2023). Tinjauan Hukum Negara Kesatuan yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances. *Jurnal Serambi Hukum*, 128-137.

Metho P. Sihombing, D. P. (2022). Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5, 1039-1051.

E. Sumber Lain

Efraim J, K. (t.thn.). Penggunaan 'Bahasa Hukum' dalam Pembentukan Peraturan. Dipetik Januari 15, 2024, pukul 12:04 WIB., dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bahasa-hukum-1t6225ac187027e> Lektur.id. Arti Kata Otorita di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dipetik Januari 15, 2024, pukul 11:51 WIB., dari <https://kbbi.lektur.id/otorita>

Nurhanisah, Y. (2019). Alasan Pemindahan Ibu Kota di Luar pulau Jawa. <https://indonesiabaik.id/infografis/alasan-pemindahan-ibu-kota-di-luar-pulau-jawa>